

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1999)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004)
- Agus Budianto, *Standar perasional Prosedur (SOP) Program Pascasarjana Magister Hukum*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang Poko Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003)
- _____, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya – Jilid I*, (Jakarta, Djambatan, 1994)
- _____, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, cet.19*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- _____, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)
- Elia Ardyan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bali: Nilacakara, 2018)
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013)
- Moch Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020)
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*

Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

_____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

R Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty,
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2010)

Suratman & H Philiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2022)

_____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Jurnal:

Ahmad Fekry M, “*Electronic evidence and its authenticity in forensic evidence*”,
Jurnal of Forensic Sciences, Vol. 11 No. 20, 2021. DOI:
<https://doi.org/10.1186/s41935-021-00234-6>

Androvaga Renandra Tetama, “*Political Law of Electronic Land Registration Post the Job Creation Act*”, Tunas Agaria, Vol. 6 No.1, 2023. DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13834686>

Dini Sukma, et al, “*Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda*”,
Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2 2014, DOI:
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38859/25732>

- Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol.11 No. 1, Maret 2014, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1114>
- Neneng Asaniyah, "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigrasi", Buletin Perpustakaan No. 57, Mei 2017, hal. 89. DOI: <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/9105>
- Ridho Laksono, "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Proses Alih Media Arsip Statis", Universitas Gadjah Mada, Vol. 1 No. 1, 2017. DOI: [10.22146/diplomatika.28271](https://doi.org/10.22146/diplomatika.28271)
- Satriawan Nurtanto, Implementasi Pasal 32 ayat 2 PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg, Vol. 14 No. 5, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i5.399>
- Sukmo Pinuji, "Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial dalam Rangka Perwujudan *One Map Policy*", Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei 2016. DOI: [10.31292/jb.v2i1.31](https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31)
- U Indrayanto, Perubahan Pokok Dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 Dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 No. 3, 2006. DOI: [10.21143/jhp.vol36.no3.1264](https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1264)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Website/Internet:

ANTARA News, Nusron sebut sertifikat tanah periode 1961-1997 rawan diserobot, Kamis 20 Maret 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4723609/nusron-sebut-sertifikat-tanah-periode-1961-1997-rawan-diserobot> , diakses pada 08 April 2025

Zul Aktual, “Sistim Pelayanan Digital, Pertanahan Kota Medan Terbitkan Sertifikat Elektronik”, 13 Agustus 2024, <https://aktualonline.co.id/2024/08/13/sistim-pelayanan-digital-pertanahan-kota-medan-terbitkan-sertifikat-elektronik/> diakses pada 05 Maret 2025 melalui berita Aktual “Berbicara Fakta” Online.

Espos.id, “Menteri ATR Sebut Sertipikat Tanah Terbitan Tahun 1961-1997 Rawan Diserobot”, Kamis, 20 Maret 2025, <https://news.espos.id/menteri-atr-sebut->

[sertipikat-tanah-terbitan-tahun-1961-1997-rawan-diserobot-2074271](#) diakses pada 08 April 2025

Prahasto W, “Menguji Kekuatan Pembuktian e-Sertipikat Hak atas Tanah”, hukumonline.com, 13 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-kekuatan-pembuktian-e-sertifikat-hak-atas-tanah-lt67d2de32caf8b/> , diakses pada 25 April 2025.

TVOneNews, “Waspada! Sertifikat Tanah Terbitan 1961-1997 Rawan Diserobot, Ini Solusi dari BPN”, Kamis 20 Maret 2025, <https://www.tvonenews.com/ekonomi/312974-waspada-sertifikat-tanah-terbitan-1961-1997-rawan-diserobot-ini-solusi-dari-bpn> diakses pada 08 April 2025

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Elsaria Tarigan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Medan, Tanggal 09 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Seti Kuncoro, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Medan, Tanggal 09 April, pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Hamdani Azmi, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, Tanggal 09 April 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Syafrida Ayulita Siregar, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, Tanggal 09 April 15.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Putra Wijaya Sitorus, Notaris/PPAT Kabupaten Serdang Bedagai, Medan, Tanggal 10 April, pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Dewi Lestari, Notaris/PPAT Medan, Medan, Tanggal 10 April, pukul 12.00 WIB.